

Sosok Ideal Lulusan Pendidikan Vokasi Indonesia Generasi 2045

Bernardus Sentot Wijanarka
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin
Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
E-mail: bsentot@gmail.com

Abstrak

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Tujuan akhir kurikulum pendidikan vokasi tidak hanya diukur melalui pencapaian prestasi berupa nilai tetapi melalui hasil dari pencapaian tersebut, yaitu hasil dalam bentuk unjuk kerja di dunia kerja atau *outcome*. Unjuk kerja calon tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja selalu berubah sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat itu sedang digunakan dan *soft skill* yang berwujud karakter tenaga kerja yang berkaitan erat dengan jenis pekerjaan yang dihadapi. Makalah ini akan membahas terutama mengenai karakter lulusan pendidikan vokasi yang ideal menghadapi tahun 2045. Sosok ideal lulusan pendidikan vokasi di masa yang akan datang adalah sosok yang memiliki kompetensi kerja sesuai dengan kualifikasi kerja yang berlaku nasional, regional maupun internasional. Kompetensi kerja tersebut meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan aplikasi dari pengetahuan dan keterampilannya. Sebagai pendukung agar selalu bisa mengikuti perubahan jaman dan mampu bertahan di era global, maka mereka juga harus menguasai keterampilan generik yang berlaku untuk semua level kompetensi kerja.

Kata kunci: vokasi, kualifikasi kerja, keterampilan generik

Pendahuluan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Visi pendidikan nasional yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan jaman yang selalu berubah (Permendiknas No. 41, 2007). Pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pelaksanaan proses tersebut memerlukan

pendidik yang dapat memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Implikasi dari prinsip ini ialah pergeseran paradigma proses pendidikan, yaitu dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus (UU Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Pada penjelasan UUSPN Pasal 15 dinyatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan kejuruan yang diselenggarakan ialah pendidikan menengah kejuruan dengan nama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Pada pasal 20 UUSPN dikemukakan bahwa pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi dan/atau vokasi. Sesuai dengan UUSPN di atas pendidikan kejuruan diselenggarakan di pendidikan menengah dan vokasi di pendidikan tinggi. Pada dasarnya pendidikan vokasi meliputi pendidikan di sekolah menengah dan di pendidikan tinggi, karena tujuan dan proses pembelajarannya identik.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diperoleh indikasi bahwa, sebagian besar lulusan pendidikan vokasi kurang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan/perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak mudah dilatih kembali atas kekurangannya. Hal yang sama dikemukakan juga dalam hasil kajian yang diadakan oleh Direktorat Pembinaan SMK (2008: 135) bahwa, masih terdapat kesenjangan kompetensi antara apa yang diberikan di sekolah kejuruan dengan kebutuhan riil pihak industri. Kesesuaian antara kompetensi yang diberikan di sekolah kejuruan dengan yang dibutuhkan dunia industri sekitar 60% sampai 80%, dengan kesenjangan terbesar pada industri besar dan kesenjangan terkecil pada kegiatan wirausaha. Temuan tersebut tampaknya mengindikasikan bahwa pembelajaran di sekolah kejuruan belum tampak menyentuh pada pengembangan diri dalam kemampuan adaptasi peserta didik. Studi ini juga memperoleh gambaran bahwa sebagian lulusan SMK tidak dapat diserap di lapangan kerja.

Pemerintah Indonesia telah menanda tangani perjanjian kerjasama global, yaitu C-AFTA, I-AFTA, AEC, dan WTO. Selain itu pada tahun 2015 akan terjadi

pasar tunggal pada tingkat ASEAN yang menyebabkan terjadinya pasar bebas dalam bidang barang, jasa, investasi, modal, tenaga profesional dan tenaga kerja terlatih. Apabila hal tersebut terjadi pada 2015 kemudian diikuti WTO pada tahun 2020, maka mulai saat itu tenaga kerja Indonesia harus mampu bersaing secara global, karena mau tidak mau tenaga kerja asing masuk ke Indonesia dan tenaga kerja Indonesia juga harus mampu bekerja di luar negeri khususnya di negara-negara yang telah mengikuti kerjasasa global tersebut. Bertolak dari hal tersebut maka perancang atau penyelenggara pendidikan vokasi sebagai penghasil tenaga kerja terampil harus mulai mengidentifikasi: bagaimanakah sosok ideal lulusan pendidikan vokasi yang siap berkompetisi di era global mulai tahun 2020 dan pada tahun 2045 ketika bangsa Indonesia memasuki usia emas, serta kompetensi lulusan seperti apakah yang diperlukan oleh dunia kerja nasional, regional maupun international.

Pendidikan vokasi dan kurikulum berbasis kompetensi

Pendidikan ialah sebagai wahana untuk membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan guna menjalani dan mengatasi masalah kehidupan pada masa yang akan datang yang selalu mengalami perubahan. Mobley (Barlow dkk, 1988) mengemukakan tentang filosofi pendidikan vokasi (*career and technical / C&T*) yang seharusnya diikuti oleh pihak yang terlibat yaitu: (1) *C & T education must be a part of the total education program*, (2) *C&T education must be available to all people*, (3) *C&T education must be everyone's concern*, (4) *Professionalization of C&T must continue*, dan (5) *Student organizations must be considered part of the total C&T program*. Sebelumnya Prosser mengemukakan enam belas teorema tentang pendidikan vokasi. Teorema yang pertama dan kedua berhubungan langsung dengan proses pembelajaran di pendidikan vokasi, yaitu :

- (1) *Vocational education will be efficient in proportion as the environment in which the learner is trained is replica of the environment in which he must subsequently work*, dan
- (2) *Effective vocational training can only be given where the training jobs are carried on in the same way, with the same operations, the same tools, and the same machines as in the occupation it self* (Camp dan Johnson, 2005: 37).

Berdasarkan dua pendapat tersebut dapat difahami bahwa pendidikan vokasi harus dikelola dengan sungguh-sungguh agar lulusan (*output*) dan *outcomenya* sesuai dengan kompetensi kerja yang diminta oleh dunia kerja.

Menurut Kepmendiknas No. 045/U/2002 yang dimaksud dengan kompetensi ialah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 229 tahun 2003 yang dimaksud kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedang menurut PDRI dan Aguirre International (2005: 4): “*A competency is the capability to apply or use a set of related knowledge, skills, and abilities required to successfully perform “critical work functions” or tasks in a defined work setting.*” Senada dengan pendapat tersebut Ennis (2008: 4) mengemukakan: “*A competency is the capability of applying or using knowledge, skills, abilities, behaviors, and personal characteristics to successfully perform critical work tasks, specific functions, or operate in a given role or position.*” Berdasarkan keempat definisi tersebut dapat diketahui bahwa kompetensi meliputi aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) dalam mengerjakan tugas dalam bidang tertentu.

Pendidikan vokasi di Indonesia telah mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi sesuai dengan Kepmendiknas no. 232/U/2000. Lulusan dengan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi di pendidikan vokasi sampai saat ini belum memuaskan hasilnya karena pada saat pelaksanaan pengembangan kurikulum menggunakan asumsi bahwa kompetensi yang direncanakan tidak berubah selama peserta didik mengikuti pendidikan. Pada kenyataannya standar kompetensi yang diterapkan oleh dunia kerja sebagai pengguna lulusan pendidikan vokasi, selalu berubah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di lain pihak, ada beberapa bidang keahlian yang belum memiliki standar kompetensi yang jelas, sehingga kurikulum yang dikembangkan hanya berdasarkan masukan dari para pakar melalui *focus group discussion*. Konsekuensi dari ketidak sesuaian kompetensi (*outcome*) pendidikan vokasi dengan kompetensi yang dibutuhkan merupakan salah satu faktor terjadinya pengangguran.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di <http://www.bps.go.id> (Agustus 2011) mengenai kondisi calon tenaga kerja dan tenaga kerja di Indonesia, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia didominasi oleh lulusan SMTA (umum dan

kejuruan) yaitu sebesar 3.074.946 orang dari total pengangguran yang mencapai 7.700.086 orang atau jumlah pengangguran terbuka untuk tamatan SMTA sebesar 40%. Pengangguran lulusan pendidikan vokasi (Diploma I/II/III dan Akademi) pada tahun 2011 sebesar 434.457 orang (5,35%). Pengangguran terbuka berarti orang tersebut sedang: mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Melihat besarnya pengangguran tersebut, maka diperlukan perubahan orientasi pendidikan supaya lulusan pendidikan vokasi pada masa yang akan datang memiliki kualifikasi kerja yang memadai untuk bekerja di negeri sendiri atau di luar negeri. Berkaitan dengan hal tersebut pada pembahasan berikut dideskripsikan mengenai kualifikasi kerja di Indonesia dan di beberapa negara yang bekerja sama dengan Indonesia pada tingkat ASEAN dan negara tetangga terdekat yaitu Australia yang telah memiliki kualifikasi kerja.

Kualifikasi Kerja Nasional (*National Qualifications Frameworks*) dan kualifikasi lulusan pendidikan vokasi

Beberapa negara di wilayah ASEAN dan sekitarnya telah memiliki kualifikasi kerja untuk pendidikan/pelatihan vokasi serta pendidikan tinggi. Negara-negara ASEAN yang telah memiliki kualifikasi kerja antara lain: Malaysia, Philipina, Singapura, dan Thailand. Sedangkan negara terdekat dari Indonesia yaitu Australia telah memiliki kualifikasi kerja nasional lebih dari 15 tahun (APEC, 2009). Dengan akan diterapkannya pasar global di tingkat ASEAN dapat dikatakan negara yang telah memiliki kualifikasi kerja nasional telah siap melaksanakan pasar global untuk sektor tenaga kerja. Sampai dengan tahun 2011 Indonesia belum memiliki kualifikasi kerja nasional, baru pada tahun 2012 ditetapkan Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) berdasarkan Peraturan Presiden No.8 tahun 2012.

KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI dimaksudkan sebagai uraian *outcome* yang harus dikuasai oleh lulusan pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, lembaga pelatihan maupun belajar mandiri. KKNI

membagi *outcome* hasil pendidikan, pelatihan, atau pengalaman ke dalam 9 jenjang kualifikasi. Jenjang 1 merupakan jenjang terendah dan jenjang 9 jenjang tertinggi.

Tabel 1. Deskripsi Jenjang Kualifikasi 2 sampai 6 KKNi menurut Peraturan Presiden No.8 tahun 2012

Jenjang Kualifikasi	Uraian
2	Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya.
	Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.
3	Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menterjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.
	Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.
	Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.
4	Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
	Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya.
	Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.
5	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
	Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
6	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Lulusan pendidikan kejuruan (SMK dan MAK) diharapkan memiliki kualifikasi jenjang 2, sedangkan lulusan diploma I/II/III/IV diharapkan memiliki kualifikasi jenjang 3,4,5 dan 6 secara berturut-turut. Uraian jenjang kualifikasi untuk level 2 sampai dengan level 6 adalah seperti pada Tabel 1.

Berdasarkan uraian jenjang KKNi di atas, dapat dianalisis bahwa kualifikasi lulusan pendidikan vokasi meliputi keterampilan, pengetahuan, keterampilan komunikasi dan derajat kemandirian yang dikuasai. Penguasaan pengetahuan pada bidang keahliannya ditunjukkan dalam penguasaan konsep teoritis. Kemampuan berkomunikasi meliputi komunikasi verbal dan tertulis. Penguasaan ketrampilan ditunjukkan dalam unjuk kerja ketika mengaplikasikannya. Jenjang kualifikasi ditentukan oleh: kedalaman, kompleksitas, dan kekomprehensivan pengetahuan yang dikuasai. Uraian jenjang pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian yaitu penguasaan *hard skills* (teori, dan praktik) dan *soft skill*. Penguasaan *hard skill* kedalaman dan kekomplekannya berjenjang. Penguasaan *soft skill* pada semua jenjang pada dasarnya meliputi keterampilan berkomunikasi sesuai dengan bidang kerjanya yang meliputi komunikasi verbal dan tertulis. Keterampilan berkomunikasi diperlukan pada semua jenjang kualifikasi, sehingga dapat dikatakan merupakan keterampilan yang mutlak diperlukan dan seharusnya diajarkan di sekolah vokasi.

Pada saat ini KKNi belum menjadi acuan pihak sekolah umum, sekolah vokasi, perguruan tinggi, penyelenggara pelatihan formal/non formal dan pengguna tenaga kerja. Pihak departemen pendidikan dan kebudayaan serta pihak departemen tenaga kerja sedang berupaya agar ketentuan dalam KKNi diikuti dan diacu oleh semua pihak yang berkepentingan. Sekolah vokasi merupakan pihak yang paling berkepentingan dengan KKNi karena pemberlakuan KKNi mulai tahun 2012 ini akan merubah kurikulum dan proses pembelajarannya. Pihak lain yang berkaitan dengan akreditasi, sertifikasi, pengakuan kompetensi, pengguna tenaga kerja juga belum siap menanggapi keberadaan KKNi karena merupakan hal yang baru dan belum tersedia peraturan atau petunjuk teknik dan pelaksanaannya.

Kualifikasi Kerja Negara Tetangga (ASEAN) dan Australia

Malaysia, Singapura, Thailand dan Philipina merupakan negara yang sudah memiliki kerangka kualifikasi kerja nasional lebih dulu dari pada Indonesia. Apabila dibandingkan dengan KKNi, maka kerangka kualifikasi mereka memiliki jenjang

kualifikasi yang berbeda. Kualifikasi kerja negara Malaysia terdiri dari 8 level, Singapura terdiri dari 7 level, Philipina jumlah level berbeda untuk tiap sektor tapi mengacu pada pendidikan vokasi dan pelatihan teknik yang terdiri dari 8 level, dan Thailand terdiri dari 6 level. Level kualifikasi yang digunakan oleh beberapa negara tersebut selalu dikaitkan dengan jenjang pendidikan, terutama pendidikan vokasi. Hal tersebut karena pendidikan vokasi merupakan jenjang pendidikan yang langsung berhubungan dengan dunia kerja dan kualifikasi akademik lulusannya harus sesuai dengan yang ditentukan oleh penerima kerja (*demand driven*). Hasil pendidikan vokasi diharuskan memiliki *outcome* yang spesifik sesuai dengan level kualifikasi kerja yang ditentukan di masing-masing negara.

Kualifikasi kerja yang diterapkan di negara-negara tersebut pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan KKNI. Uraian *outcome* hasil pendidikan atau belajar mandiri/pengalaman terdiri dari: (1) pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai; (2) aplikasi; dan (3) derajat kemandirian. *Outcome* yang dicapai seseorang pada level tertentu disetarakan dengan jenjang pendidikan umum, pendidikan vokasi, maupun pendidikan tinggi. Dengan demikian pada dasarnya level *outcome* bisa dicapai tidak hanya melalui jalur pendidikan tetapi bisa dari pengalaman atau belajar mandiri melalui pengakuan kompetensi yang telah dikuasai oleh seseorang (*recognition of prior learning*).

Kualifikasi kerja negara Australia (AQF/*Australian Qualifications Framework*) telah ada sejak tahun 1995 sehingga merupakan kerangka kualifikasi kerja yang paling tua dibandingkan dengan yang dimiliki oleh negara-negara tetangganya. AQF yang paling akhir disusun pada tahun 2011. AQF membagi kualifikasi kerja menjadi 10 level, pada masing-masing level diuraikan kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan aplikasi pengetahuan dan ketrampilan.

Menurut AQF (2011) pengetahuan adalah apa yang lulusan kuasai dan fahami. Hal tersebut berdasarkan pada kedalaman, keluasan, jenis pengetahuan dan kekomplekan pengetahuan sebagai berikut: (1) kedalaman pengetahuan dari yang umum atau khusus; (2) keluasan pengetahuan mulai dari satu topik sampai area pengetahuan multi disiplin; (3) jenis pengetahuan dari hal yang konkrit ke yang abstrak, dari bagian ke keseluruhan; dan (4) kekomplekan pengetahuan berdasarkan

kombinasi dari kedalaman, keluasan dan jenis dari pengetahuan. Keterampilan adalah apa yang dapat dilakukan lulusan. Keterampilan dideskripsikan menurut jenis dan kekomplekan yang meliputi: (1) keterampilan kognitif dan kreatif yang berisi penggunaan intuisi, logika dan berpikir kritis; (2) keterampilan teknis yang berisi keterampilan manual dan penggunaan metode, bahan, alat dan instrumen; (3) keterampilan berkomunikasi yaitu menulis, berbicara, membaca dan berhitung; (4) keterampilan interpersonal dan generik. Aplikasi pengetahuan dan keterampilan dalam konteks penerapan pengetahuan dan keterampilan, khususnya yang ditunjukkan oleh kemandirian, tanggung jawab dan akuntabilitas. Aplikasi ini dalam jangkauan yang bisa diprediksi sampai dengan yang tidak bisa diprediksi, dari yang bisa diketahui sampai dengan yang tidak diketahui, dan tugas yang dikerjakan dari kegiatan rutin sampai dengan non rutin.

Outcome keterampilan generik atau keterampilan umum menjadi satu dengan kualifikasi dalam proses pengembangannya dan aplikasinya spesifik pada sektor pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian keterampilan generik ini harus dikuasai pada semua level. *Outcome* keterampilan generik dapat ditransfer dan bukan kemampuan spesifik satu disiplin ilmu yang dapat dicapai oleh lulusan melalui belajar, bekerja, maupun dalam konteks hidup sehari-hari. *Outcome* keterampilan generik pada AQF terdiri dari empat kategori besar, yaitu: (1) keterampilan-keterampilan dasar, misalnya membaca dan berhitung sesuai dengan level dan tipe kualifikasinya, (2) keterampilan sosial seperti bekerja sama dan kemampuan berkomunikasi, (3) keterampilan berpikir seperti belajar bagaimana belajar (*learning to learn*), kemampuan mengambil keputusan dan kemampuan memecahkan masalah; dan (4) keterampilan personal seperti mandiri dan integritas. *Outcome* sesuai dengan kualifikasi kerja tersebut harus menjadi acuan para pengelola pendidikan terutama pendidikan vokasi agar kompetensinya diakui oleh dunia kerja.

Pengakuan kompetensi lulusan pendidikan vokasi di Indonesia

Semua pendidikan vokasi di Indonesia pada saat ini menerapkan kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi yang diacu sebagai ukuran ketercapaian kurikulum sesuai dengan definisi kompetensi tidak diukur oleh pihak eksternal akan tetapi diukur melalui evaluasi pembelajaran yang dilakukan pihak internal penyelenggara pendidikan. Kompetensi dilambangkan dengan angka atau nilai rapor di SMK dan

nilai mata kuliah dalam bentuk huruf A sampai E di pendidikan tinggi vokasi. Peserta digolongkan kompeten apabila telah melewati kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan oleh pengajar atau oleh program studi. Pengakuan kompetensi lulusan jenjang pendidikan ditunjukkan oleh ijazah. Dengan demikian ijazah sebagai pengakuan kompetensi tersebut diakui oleh sekolah dan pemerintah sebagai bukti ketuntasan belajar bukan sebagai bukti kualifikasi kerja atau *outcome* lulusan.

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah badan yang memiliki kewenangan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja (PP. No.23/2004). Sertifikat kompetensi kerja yang dikeluarkan oleh BNSP diakui secara nasional oleh pengguna tenaga kerja. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau internasional. Sertifikat kompetensi kerja digunakan oleh pemilikinya untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan kompetensi spesifik yang tertulis pada sertifikat tersebut tanpa melalui tes masuk pada bidang keahliannya.

Pada saat ini sebagian besar sekolah vokasi belum bekerja sama dengan pihak BNSP dalam rangka memberikan sertifikat kompetensi kerja pada semua lulusannya. Hal tersebut karena banyaknya variasi kompetensi keahlian, keterbatasan jumlah asesor, keterbatasan jumlah lembaga sertifikasi profesi (LSP), dan keterbatasan anggaran sertifikasi. Pihak BNSP belum mampu untuk menangani semua level sertifikasi untuk semua bidang keahlian. Apabila semua peserta didik sekolah vokasi (SMK, DI, DII, DIII, DIV) harus mengikuti proses sertifikasi, maka proses sertifikasi akan memakan waktu sangat lama karena keterbatasan jumlah asesor dan (LSP). Pertimbangan terakhir adalah besarnya biaya proses sertifikasi yang harus ditanggung oleh peserta didik dan lembaga pendidikan. Bertolak dari kenyataan tersebut maka pada saat ini lulusan sekolah vokasi dapat dikatakan semuanya belum memiliki sertifikat kompetensi kerja yang diakui oleh BNSP maupun oleh pengguna tenaga kerja. Lulusan pendidikan vokasi pada saat ini bisa dikatakan sebagai tenaga siap dilatih, karena untuk dikatakan siap kerja mereka harus menempuh pelatihan spesifik sesuai bidang kerja yang akan dijalani sampai dengan memperoleh sertifikat sesuai kualifikasi kerja.

Karakteristik lulusan pendidikan vokasi menjelang tahun 2045

ILO (2012) yang diprakarsai oleh negara-negara maju G20 menyatakan bahwa: “*it is no longer sufficient to train workers to meet their specific current needs; we should ensure access to training programs that support lifelong skills development and focus on future market needs*”. Dengan demikian sangat penting untuk mengantisipasi keterampilan yang diperlukan dan menyelaraskan pelaksanaan pelatihan dengan kebutuhan yang selalu berubah di pasar kerja. Perubahan tersebut diterapkan pada jenis dan level kualifikasi kerja yang diperlukan di lapangan pekerjaan maupun teknik. Secara keseluruhan permintaan yang berkembang untuk keterampilan analitik non rutin meliputi: kreativitas, memecahkan masalah, komunikasi, bekerja dalam tim dan kewirausahaan. Keterampilan-keterampilan tersebut dapat membantu pekerja untuk mempertahankan kemampuan kerjanya dan menimbulkan kemampuan bertahan apabila menghadapi perubahan. Di lain pihak permintaan menurun untuk keterampilan rutin karena penerapan otomatisasi, digitalisasi dan *outsourcing*.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka karakteristik lulusan pendidikan vokasi agar bisa bertahan di era global yang selalu berubah adalah memiliki keterampilan pada bidangnya yang meliputi pengetahuan, ketrampilan, dan aplikasi pengetahuan dan ketrampilan, serta memiliki keterampilan generik yang berlaku untuk semua level kualifikasi, yaitu: (1) keterampilan- keterampilan dasar, misalnya membaca dan berhitung sesuai dengan level dan tipe kualifikasinya, (2) keterampilan sosial seperti bekerja sama dan kemampuan berkomunikasi, (3) keterampilan berpikir seperti belajar bagaimana belajar (*learning to learn*), kemampuan mengambil keputusan dan kemampuan memecahkan masalah; dan (4) keterampilan personal seperti mandiri dan integritas

Penutup

Menghadapi era global lulusan pendidikan vokasi harus selalu siap menyesuaikan kompetensi kerjanya. Sosok ideal lulusan pendidikan vokasi di masa yang akan datang adalah sosok yang memiliki kompetensi sesuai dengan kualifikasi kerja yang berlaku nasional maupun regional serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kompetensi kerja tersebut meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan aplikasi dari pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan bidang keahliannya.

Sebagai pendukung agar selalu bisa mengikuti perubahan jaman dan mampu bertahan di era global, maka mereka juga harus memiliki keterampilan generik yang berlaku untuk semua level kompetensi.

Referensi

- AQF Council. (2011). *Australian Qualifications Framework First Edition*. AQF Council: South Australia
- APEC. (2009). *Mapping Qualifications Frameworks across APEC Economies*. APEC: Singapore
- Barlo, M.L, Burrkett, L.A., & Hoelscher, G. (1988). *The Legacy of M.D. Mobley and Vocational Education*. American Vocational Association.
- Camp, W.G., & Johnson, C.L. (2005). Evolution of a Theoretical Framework for Secondary Vocational Education and Career and Technical Education over the Past Century. Dalam Gregson, J.A, dan Allen, J.M. (Eds). *Leadership in Career and Technical Education: Beginning The 21st Century*, pp(29-62). Columbus Ohio: UCWHRE.
- Direktorat Pembinaan SMK. (2008). *Kajian Peranan SMK Kelompok Teknologi Terhadap Pertumbuhan Industri Manufaktur*. Jakarta : Direktorat Pembinaan SMK Depdiknas.
- Depdiknas. (2000). *Kepmendiknas no. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa*.
- Depdiknas. (2002). *Permendiknas No. 45, Tahun 2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi*.
- Depdiknas. (2003). Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Depdiknas. (2007). *Permendiknas No. 41, Tahun 2007, tentang Standar Proses untuk Satuan pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Depdiknas. (2009). *Permendiknas No. 28, Tahun 2009, tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)*.
- Depnakertrans. (2004). *Kep. 240/MEN/X/2004, tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Logam dan Mesin*.
- ILO. (2012). *World of work report 2012: Better jobs for a better economy*. ILO : Geneva
- OECD. (2001). *Competencies for the Knowledge Economy*. Diambil pada tanggal 25 September 2012, dari http://www.oecd.org/data_oecd/42/25/1842070.pdf
- MQF. (2009). *Kerangka Kelayakan Malaysia*. Diambil pada tanggal 28 September 2012, dari <http://www.mqa.gov.my/mqr/>
- Personnel Decisions Research Institutes, Inc. (PDRI), & Aguirre International. (2005). *Technical Assistance Guide for Developing and Using Competency Models- One Solution for a Demand-Driven Workforce System*. Washington, DC: Employment and Training Administration.
- Sekretariat Kabinet. (2012). *Peraturan Presiden No.8 tahun 2012 tentang Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI)*.
- Unesco. (2001). *Technical and Vocational Education and Training for the Twenty-first Century Unesco Recommendations*.

